

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

M. Ikrar Budijaya

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: * budijaya28@yahoo.com

ABSTRAK

Kemiskinan seringkali diidentikan dengan perdesaan, namun yang terjadi justru terjadi di perkotaan, yang ditandai dengan kondisi kehidupan dan pendapatan yang buruk, serta kurangnya layanan dasar untuk standar hidup yang layak. Kemiskinan perkotaan terjadi akibat dari kurangnya kesempatan dan pelatihan bagi sebagian besar penduduk usia kerja. Kurangnya investasi, lapangan pekerjaan, kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas dan layanan dasar seperti kesehatan, masalah sanitasi, pengelolaan sampah dan berbagai faktor dari lingkungan buruk menjadi konsekuensinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian ini termasuk ke dalam studi literature. yaitu sebuah penelitian yang secara khusus berdasarkan pengumpulan data dari dokumentasi, studi kepustakaan, laporan-laporan yang selanjutnya dilakukan analisis untuk diberikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya belum berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam mencapai keberhasilannya, sehingga pelaksana kebijakan perlu melakukan berbagai upaya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam upaya mencapai keberhasilannya.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, kependudukan dan kemiskinan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan dipandang sebagai suatu keadaan dimana seseorang atau masyarakat kekurangan sumber daya keuangan dan kebutuhan dasar untuk standar hidup minimum. Kemiskinan dapat diartikan sebagai tingkat pendapatan dari pekerjaan yang sangat rendah sehingga kebutuhan dasar manusia tidak dapat dipenuhi. Individu dan keluarga yang dilanda kemiskinan dapat dibiarkan tanpa perumahan yang layak, air bersih, makanan sehat dan perawatan medis. Kemiskinan mengacu pada kurangnya kekayaan atau pendapatan sehingga individu dan rumah tangga tidak memiliki sarana untuk bertahan hidup atau memperoleh kebutuhan dasar untuk kehidupan yang memuaskan, hal tersebut berarti menjadi sangat miskin sehingga harus berjuang untuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan obat-obatan.

Masalah kemiskinan merupakan masalah individu dan masalah sosial yang lebih luas. Pada tingkat individu atau keluarga, tidak mampu memenuhi kebutuhan dapat menyebabkan berbagai masalah fisik dan mental. Di tingkat masyarakat, tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan dikaitkan

dengan masalah seperti kejahatan, pengangguran, kerusakan kota, kurangnya pendidikan dan kesehatan yang buruk, sehingga pemerintah sering menerapkan program perlindungan sosial untuk membantu keluarga keluar dari kemiskinan. Guncangan ekonomi, kerawanan pangan, dan perubahan iklim mengancam pendapatan mereka dan dapat mendorong mereka kembali ke jurang kemiskinan.

Penyelesaian masalah kemiskinan ibarat sebuah siklus yang sulit diputus dan seringkali berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemiskinan bukan saja melibatkan lebih dari sekadar kurangnya pendapatan dan sumber daya produktif untuk memastikan mata pencaharian yang berkelanjutan, manifestasinya termasuk kelaparan dan kekurangan gizi, akses terbatas ke pendidikan dan layanan dasar lainnya, diskriminasi dan pengucilan secara sosial, dan kurangnya partisipasi dalam pengambilan setiap keputusan dalam pemerintahan. Peningkatan populasi membebani sumber daya dan anggaran negara. Pemerintah berjuang untuk menyediakan makanan, tempat tinggal dan pekerjaan bagi populasi yang terus bertambah.

Faktor kemiskinan seringkali dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya status sosial ekonomi, etnis, gender dan geografi. Banyak orang dilahirkan dalam kemiskinan dan memiliki sedikit harapan untuk mengatasinya, sementara yang lain mungkin jatuh ke dalam situasi ini karena kondisi ekonomi yang negatif, bencana alam atau meningkatnya biaya hidup, serta kecanduan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Konflik dan kerusakan geopolitik juga dapat menyebabkan kemiskinan karena keluarga terlantar. Diperlukan adanya kebijakan pemerintah maupun dalam bentuk program yang mendorong orang miskin untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan dan pendidikan juga penting sebagai solusi jangka panjang.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, masalah seperti kelaparan, penyakit dan kurangnya kebersihan merupakan penyebab dan akibat dari kemiskinan, yang artinya tidak memiliki makanan berarti miskin, tetapi miskin juga berarti tidak memiliki sarana untuk membeli makanan atau air minum. Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi dengan berbagai dampak negatif seperti kurangnya pendidikan, diskriminasi budaya dan agama, pengangguran, kepadatan penduduk dan korupsi. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun kebijakan di tingkat daerah. Bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan penyaluran bansos yang belum tepat sasaran merupakan salah satu masalah utama yang harus segera dicarikan solusi terbaiknya. Belum tepatnya sasaran disebabkan oleh diskresi pelaksana program di lapangan, dimana kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan (Rakhmat & Firdaus, 2019). Penelitian lainnya menjelaskan terdapat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu: Pertama, kebijakan tidak langsung, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya

penanggulangan kemiskinan. Kedua, kebijakan langsung, yang ditujukan untuk meningkatkan peran dan produktivitas sumber daya manusia (Sari, dkk, 2022).

Definisi kebijakan itu sendiri dikemukakan Lasswell dan Kaplan (Islamy, 2004) menyatakan: "Peraturan atau kebijakan sebagai prosedur untuk mencapai tujuan, nilai, dan tindakan yang di rencanakan". Pada umumnya kebijakan muncul pada saat terjadinya masalah-masalah atau persoalan yang harus segera diselesaikan, sehingga diperlukan jalan keluarnya melalui berbagai cara dan upaya untuk menyelesaikannya. Adapun istilah kebijakan publik (Anderson, 1997), menyatakan: *"policy as a relatively stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or a matter of concern"*. Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan disengaja yang diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk menangani masalah atau isu yang menjadi perhatian.

Kebijakan publik erat kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Dye (2011) menyatakan: *"public policy as anything a government chooses to do, or not to do"*. Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan sikap dari pemerintah, melakukan maupun tidak melakukan dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan. Setiap kebijakan harus dapat diimplementasikan agar dapat mencapai tujuan sebagaimana dibuatnya kebijakan. Disebutkan bahwa: *"Policy implementation involves translating the goals and objectives of a policy into an action"* (Anisur, 2016), yang dapat diartikan implementasi kebijakan menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan ke dalam tindakan.

Setiap pelaksanaan kebijakan dalam mencapai keberhasilannya akan menghadapi berbagai faktor pendukung maupun penghambatnya. Terdapat beberapa model yang dikembangkan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, dimana merupakan proses pengembangan yang dilakukan secara rasional, faktor pengelolaan, faktor organisasi pelaksana, dukungan politik dan birokrasi pelaksana yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara tepat dan lebih mendekati terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dijelaskan (Jones, 1970) bahwa: "Tahapan kebijakan atau model proses mencirikan pembuatan kebijakan dalam hal identifikasi masalah dan penetapan agenda, perumusan alternatif kebijakan, pemilihan dan adopsi alternatif kebijakan yang disukai, implementasi dan evaluasi kebijakan".

Menurut Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa Pemerintah terus mencari cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah dibuatnya. Meskipun implementasi kebijakan telah diakui sebagai hal yang penting untuk menutup kesenjangan antara janji-janji politik dan hasil-hasil politik, prosesnya sendiri rumit dan beragam dan belum dipahami dengan baik. Implementasi kebijakan secara umum didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak lain untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam pernyataan kebijakan (Jhon, 2019).

Kemajuan sebuah kota tidak menjamin terhadap kesejahteraan masyarakatnya, hal tersebut tercermin dimana Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang

memiliki perkembangan yang cukup pesat, dan dijadikan sebagai pusat perekonomian yang menjadi magnet bagi wilayah disekitarnya. Namun demikian dari data BPJS Provinsi Jawa Barat menunjukkan tingkat kemiskinan masih tinggi, sementara berbagai program telah digulirkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan berbagai kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, serta adanya instansi yang secara khusus menangani masalah-masalah sosial di Kota Tasikmalaya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literature. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008, hal. 3). Metode ini disebut juga sebagai penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, dokumen sebagai sumber datanya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, yaitu dengan membaca, menganalisis data berasal dari dokumen-dokumen tentang implemenasi kebijakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Tasikmalaya, baik berupa media media cetak maupun elektronik, dimana dari setiap data yang diperoleh selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan suatu daerah selalu menjadi harapan adanya peningkatan kesejahteraan baik bagi penduduk setempat maupun bagi masyarakat lain disekitarnya agar mendapatkan kesempatan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kota Tasikmalaya menjadi salah satu magnet, dimana tumbuh sebagai pusat perekonomian dengan berbagai kegilat ekonomi yang dapat menarik semua pihak, baik investor, para pelaku usaha, sampai kepada masyarakat setempat maupun pendatang atau kaum urban untuk mengambil peran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berbagai infrastruktur dibangun, mall, sarana dan prasarana publik, pembangunan hotel yang terus berkembang dan tuntutan terhadap kebutuhan rumah tinggal seperti pengembangan perumahan yang terus tumbuh subur.

Geliat ekonomi sebuah kota sering menjadi tujuan dan harapan untuk mencapai kemakmuran, namun demikian ternyata semakin berkembangnya kota, semakin kompleks masalah-masalah yang dihadapi. Masalah yang sering timbul dari adanya perkembangan sebuah kota, termasuk Kota Tasikmalaya yaitu tingkat kemiskinan yang sulit terselesaikan dan masalah yang berhubungan dengan degradasi terhadap lingkungan. Kualitas udara dan air yang buruk, ketersediaan air yang tidak mencukupi, masalah pembuangan limbah dan konsumsi energi yang tinggi diperparah dengan meningkatnya kepadatan penduduk dan infrastruktur yang

tidak memadai, persyaratan lingkungan perkotaan. Perencanaan kota yang baik akan menjadi kunci untuk mengelola tantangan ini dan tantangan lainnya seiring dengan perkembangannya Kota Tasikmalaya.

Secara umum, Provinsi Jawa Barat masih menghadapi masalah sosial, khususnya berkaitan dengan tingkat kemiskinan masyarakatnya, dimana dari data BPJS masih terdapat 6,82 ribu jiwa atau sekitar 4,2% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan garis kemiskinannya Rp. 427,4 ribu per kapita per bulan. Penduduk Kota Tasikmalaya memiliki angka kemiskinan tertinggi di Jawa Barat, yakni mencapai 13,13% pada Maret 2021 atau sebanyak 89,46 ribu jiwa. Angka tersebut meningkat 16 basis points (bps) dibanding posisi September 2020 mencapai 12,97% atau mencapai 86,13 ribu jiwa. Salah satu faktor terjadinya peningkatan kemiskinan di Kota Tasikmalaya yaitu pandemi Covid-19, dimana menimbulkan berbagai kerugian secara materil maupun imateril, banyak sektor usaha yang terhenti yang menjadikan warga masyarakat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Garis kemiskinan (GK) Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan sebesar 2,17% dari Rp. 470.150 per kapita per bulan di tahun 2020 menjadi Rp. 480.341 per kapita per bulan pada tahun 2021. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan di tahun 2021. P1 naik dari 1,75% menjadi 2,42% di tahun 2021, atau naik sebesar 0,67 point. Sementara P2 naik dari 0,39% menjadi 0,69%, atau naik sebesar 0,30 point. Fenomena yang terjadi tersebut tentu menjadi hal yang menarik, karena Kota Tasikmalaya secara kasat mata menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik dilihat dari fasilitas publik, infrastruktur, pertumbuhan perekonomian dengan berdirinya pusat-pusat perbelanjaan, peningkatan fasilitas pasar tradisional, dan hotel-hotel yang tumbuh dan berkembang sangat pesat, dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 mencapai 3,57% naik dibandingkan tahun sebelumnya -2,01%.

Berbagai program digulirkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya program BPNT, PKH dan KKS belum merubah tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang baru mencapai 11%. Dari hasil penelitian (Iwan, 2019) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan strategi untuk mengefektifkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada hasil benchmarking. Hasil tersebut berkaitan dengan dua poin utama, yaitu perlunya kemauan politik dari kepala daerah dan pembentukan lembaga khusus untuk menangani kemiskinan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Tasikmalaya, dimana tujuannya yaitu tersedianya data PMKS dan PSKS yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, terwujudnya pemahaman yang sama tentang data PMKS dan PSKS; dan meningkatnya kualitas pendataan dan pengelolaan data PMKS dan

PSKS. Dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan cukup baik dalam mencapai tujuan kebijakan, dimana dalam pelaksanaannya banyak melibatkan berbagai unsur, mulai dari Dinas Sosial, Badan-badan sosial, instansi pemerintah terkait sampai kepada unsur lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti RW dan RT. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa salah satu faktor penting dalam melaksanakan sebuah kebijakan yaitu komunikasi (Beni, 2021).

Disamping faktor komunikasi, faktor pendukung lainnya yaitu ketersediaan sumberdaya, baik sumberdaya manusia sebagai pelaksana program atau kegiatannya, maupun ketersediaan anggaran yang memadai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 mencapai Rp. 445,325 milyar, sedangkan dari seluruh jenis pendapatan mencapai Rp. 2,031 triliun. Dengan anggaran yang cukup besar tentu dapat menyiapkan anggaran yang lebih memadai untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakannya. Ketersediaan anggaran yang memadai menjadi konsekuensi dalam mencapai keberhasilan penanggulangan kemiskinan melalui beberapa program yang telah dilaksanakan.

Program tidak dapat mencapai hasil yang maksimal apabila tidak adanya anggaran yang cukup, meskipun sikap dari para pelaksana kebijakan memiliki antusias dalam melaksanakan berbagai program, namun kurangnya dukungan anggaran yang memadai akan menjadi sulit dalam mencapai keberhasilan tujuan kebijakan. Diperlukan adanya komunikasi diantara stakeholders untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan ketersediaan anggaran, terutama diantara eksekutif dan legislatif untuk memastikan besaran yang dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Tasikmalaya, serta mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait lainnya.

Penanganan sosial, pada umumnya menjadi tugas dan tanggungjawab dari Dinas Sosial beserta instansi terkait lainnya, sehingga berdasarkan faktor birokrasi sudah mencukupi dengan dibekali dengan berbagai standar operasional prosedur masing-masing. Secara umum masalah sosial bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggungjawab bersama. Namun demikian dari serangkaian pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan diperlukan adanya evaluasi, mulai dari pendataan, proses pelaksanaan, hasil yang diharapkan, selanjutnya dilakukan evaluasi mulai dari input, proses dan outpunya. Pada akhirnya keberhasilan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan perlu diadakannya sosialisasi tentang program-program yang digulirkan oleh pemerintah kepada masyarakat secara jelas dan transparan.

Evaluasi menyediakan metode sistematis untuk mempelajari suatu program, implementasi lapangan, intervensi atau inisiatif untuk memahami seberapa baik pencapaian tujuannya. Evaluasi membantu menentukan apa yang berjalan dengan baik dan apa yang dapat ditingkatkan dalam suatu program atau inisiatif. Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan diperlukan beberapa hal penting diantaranya fokus pada fase yang berbeda dari proses kebijakan, mengevaluasi

terhadap konten kebijakan, melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan, dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan itu sendiri dan dampaknya. Evaluasi kebijakan merupakan kontribusi mendasar bagi tata kelola publik yang baik, hal tersebut dapat membantu pemerintah meningkatkan desain dan implementasi kebijakan publik yang pada gilirannya dapat mengarah pada keberhasilan pencapaian tujuan, termasuk dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya belum berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuannya. Terdapat faktor penghambat diantaranya kurangnya komunikasi diantara para pelaksana kebijakan, dan kurangnya dukungan anggaran dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Sedangkan faktor pendukung, yaitu tersedianya sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan yang tersebar di beberapa instansi maupun lembaga yang memiliki tugas dalam program-program sosial di Kota Tasikmalaya

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. 1979. *Public policy making*, New York: Holt.
- Anisur Rahman Khan. 2016. *Policy Implementation: Some Aspects And Issues*.
https://Www.Researchgate.Net/Publication/320549262_Policy_Implementatio_n_Some_Aspects_And_Issues
- Beni Hartanto. 2021. Faktor Komunikasi Dalam Mencapai Keberhasilan Implementasi Kebijakan (Studi tentang Pemekaran Kelurahan di Kota Tasikmalaya). <https://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/54>
- Dye, Thomas R. 2011. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice. Hall.
- Islamy, I. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika.
- Iwan Satibi dan Undang Sudrajat. 2019. *Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya*.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/5550>
- John N. Lavis. 2019. *Understanding the supports needed for policy implementation: a comparative analysis of the placement of intermediaries across three mental health systems*.
<https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-019-0479-1>
- Jones, Charles O. 1996, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan. Rick Ismanto, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada
- Rakhmat dan Firdaus Fakihi. 2019. *Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. <https://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/IIASK/article/view/11>.
- Sari Wulandari, dkk. 2022. *Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. <https://stp-mataram.e-journal.id/IIP/article/view/1347>